BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional memiliki bagiannya integral yaitu pembangunan daerah, didasarkan terhadap otonom didalam pengelolaan sumber daya alam. Pembagiannya dan pemanfaatannya sumber dayanya nasional, baik berupa uang maupun sumber daya alam, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan mengimbangkan sistem perimbangan antara pusat dan daerah adil. Pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa Republik Indonesia menjadi beberapa daerahnya provinsi; selanjutnya, daerah provinsi dipisahkan lagi atas dasar kabupaten serta kota, dimana setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki peraturan daerah yang diaturnya dengan perundang-undangan. Pemerintah daerahnya penjalanan otonom yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang ialah urusannya dengan pemerintahan pusat, berdasarkan undang-undang. Pemerintahan daerah harus menetapkan peraturan-peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas. Dalam rangkap penyelenggaraannya daerah otonomi, pasal 18 B (2) Undang-Undang Dasar '45 menjabarkan bahwa pelayanan umum, hubungannya dengan keuangan, dan manfaat dari berbagai sumber daya alamnya yang dimiliki setiap daerah antara pemerintahan dari pusat dan daerah diatur serta diterapkan selama adanya keadilan yang tinggi serta keselarasan dari perundangan yang sudah ditetapkan sebelumnya(Bastian,2010).

Kewenangan dari otonom daerah meluas mengharuskan pemerintahan daerahnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakatnya secara adil, demokratisme, pemerataan, dan berkesinambung (Halim, 2007 : 229). Diterapkannya juga perundang-undangan Nomor 33 Tahun 2004 yang menjelaskan perimbangannya dari keuangannya yaitu antar pemerintah pusat serta daerah mengatur hubungan dasar antara pusat dan daerah.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah menyatakan akan dilaksanakannya penyelenggaraannya pemerintahan daerah yang seperti dengan isi yang terkandung Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah pelaksanaannya pengaturan serta kepengurusan urusan pemerintahan sendiri berdasar atas otonomi dan tugas pembantuan, yang mengarah agar dengan segera terciptanya masyarakat yang sejahtera melewati pelayanannya, pemberdayaannya, peningkatan dan peranannya terhadap masyarakat, dan meningkatnya daerah dalam suatu persaingan yang sengit dengan mempertimbangkan prinsip pemerataan, peradilan, keistimewaannya, demokrasi, dan kekhususannya daerah untuk sistematis Negara Indonesia.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai penimbangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengisyaratkan penyelenggaraan otonom daerah yang luas. Hubungan pemanfaatan sumber daya alam, keuangan, pelayan umum serta sumber lainnya anatara pemerintah pusat dan daerah diatur secara adil dan selaras.

Dengan perubahan otonomi daerah secara maksimal maka dapat menghasilkan pertumbuhan di bidang manapun bisa saja meningkatnya pendapatan penduduk, berkurangnya kemiskinan dan pengangguran. Diharapkan pihak manajemen dapat mengelola pendapatan yang diterima semaksimal mungkin karena dengan pendapatan yang didapat suatu daerah harus bisa mencapai tujuan utamanya yaitu demi kesejahteraan masyarakat. Suatu daerah dianggap berhasil dalam mengotonom daerahnya bilamana kebutuhan masyarakat terpenuhi dan pelayanan umum yang diberikan pemerintah dapat dirasakan oleh masyarakat dan mereka merasa puas.

Pemerintah daerah mendapat beberapa sokongan dana dari berbagai faktor yaitu dari Pendapatan Asli Daerah serta Dana Perimbangan. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan mempunyai peranan besar untuk sumber pembiayaan serta akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan ekonomi yang meningkat akan meningkatkan PAD sehingga kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah tidak terhambat. Dari keduanya pemerintahan daerah dapat menjalankan pemerintahan daerah tanpa bergantung pada pemerintah pusat semisal PAD, pendapatan yang sangat penting dari pendapatan diluar PAD karena jika kontribusi yang didapat dari PAD besar maka APBD yang diperoleh akan semakin besar dan akan menguntungkan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Kinerja keuangan daerah sendiri merupakan bagaimana pencapaian pelaksanaan hasil dari kerja dibidang keuangan daerah ditetapkan melalui suatu kebijakan tertentu, contoh dari kinerja keuangan yaitu penerimaan dan

pengeluaran daerah serta belanja daerah. Kebijakannya dalam diperimbangan kepengurusan keuangan ataupun penekanan terhadap tujuan utamanya, adalah :

(a) sumber pendanaan yang diberikan daerah otonominya dalam pelaksanaannya yang diberikan untuk menjadikan tanggungjawab, (b) pengurangan kesenjangan fiskal yang terjadi antar pemerintahan pusat dan daerah maupun daerah dengan daerah, (c) peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat di daerah, serta (d) peningkatan efektifitas, efisiensinya, dan akuntabilitas dalam mengelola sumber daya daerah yang terkhusus dalam bidang keuangan.

Pendapatan Asli Daerah pada pemerintahan daerah wilayah Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan yang cukup baik, potensi yang ditimbulkan dari kenaikan tersebut dapat membantu kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah yang masih mengalami kemiskinan. Peningkatan diketahui dari potensi yang muncul setelah diadakannya pemetaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Potensi yang memungkinkan untuk peningkatan tersebut dapat dilihat dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), biaya pajak balik nama kendaraan, retribusi-retribusi dan lainnya. Selain itu perusahaan daerah juga dapat menyokong adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Selama kurun waktu beberapa tahun belakangan ini, jumlah dana perimbangan yang dialokasikan bagi daerah terus mengalami peningkatan yang signifikan. Meskipun demikian, pemerintah mengakui adanya transfer dana untuk mengatasi kesenjangan vertikal antar pemerintah pusat dan daerah dengan DBH dan kesenjangan fiskal yang terjadi antar pemerintah daerah dengan menggunakan DAU dan DAK. Berdasarkan formula dan kriteria masih menghadapi kendala

yang signifikan, tentu saja pemerintah masih berupaya terus dengan reformulasi kebijakannya sehingga, pemerintah berharap dapat mendukung kebutuhan dana pada pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari potensi daerah sendiri dan dipungut dengan peraturan perundang-undangan. Contoh dari PAD ini sendiri terdiri dari retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, pajak daerah, dan lain-lain kekayaan daerah yang sah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Febriansyah (2015), Hamara (2013), dan Marizka (2013) menyatakan PAD berpengaruh signifikan positif kepada kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh Yunita (2008) menyatakan PAD tidak mempengaruhi signifikan terhadap tingkatan kemandirian keuangan daerah Sumatera Utara.

Dana Alokasi Umum ialah pendanaan dari pemerintahan pusat bersumbernya APBN ke daerah bilamana diberikan dalam adanya pemerataan daerah serta kemampuannya dalam bidang keuangan antar seluruh daerah-daerah, contohnya sendiri dalam pengalokasian belanja PNS daerah meliputi gaji pokok, tunjangan dan lain-lain. Menurut penelitian yang sudah ada yaitu Prasasti (2014) dan Rukmana (2013) menyatakan bahwa DAU ialah bagian yang diperoleh melalui pendanaan perimbangan mempunyai pengaruh yang signifikan negatif kepada kinerja keuangan pemerintah. Namun berbeda dengan penelitian Febriansyah (2015) dan Hamara (2013) yang menyatakan bahwa DAU yang merupakan bagian dari dana perimbangan tidak mempunyai pengaruh kepada kinerja keuangan daerah.

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersifat khusus artinya penggunaan dana berdasarkan atas kebijakan dari pihak pemberi yaitu pemerintahan pusat, contohnya kebutuhan sarana dan prasarana fisik yang meliputi kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan. Dari berbagai penelitian yang sudah ada seperti Prasasti (2014) dan Rukmana (2013) menyatakan bahwa DAK yang merupakan bagian dari dana perimbangan mempengaruhi signifik negatif kepada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tobing (2016) dan Marizka (2014) menyatakan bahwa dana alokasi khusus mempengaruhi signifik negatif kepada kemandirian keuangan pemerintah daerahnya. Namun penelitiannya Febriansyah (2015) dan Hamara (2013) menyatakan berbeda bahwa DAK yang merupakan bagian oleh pendanaan perimbangan tidak mempengaruhi kepada kinerja keuangan pemerintah daerah. Adapun perbedaan dari penelitian Iksari (2015) menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif kepada tingkatannya kemandirian keuangan pemerintahan daerah.

Dana Bagi Hasil merupakan dana berasal oleh pendapatannya APBN yang bakal dibagi hasilkan terhadap daerah dan memperlihatkan potensi dirinya dari daerah penghasilan, contohnya penerimaan pajak serta penerimaan sumber daya alam. Pendanaan Perimbangan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintahan daerah, dimana semakin banyak dana transfer yang diterima maka akan membuat kinerja pemerintah daerah menurun karena tingkat ketergantungan yang tinggi dengan pemerintah pusat.

Menurut penelitian Rukmana (2013) dan Prasasti (2014) menyatakan bahwa DBH ialah bagiannya pendanaan perimbangan mempunyai pengaruh signifik negatif kepada kinerja keuangan pemerintah daerah serta Tobing (2016) menyatakan bahwa DBH mempunyai signifik negatif kepada tingkatan kemandirian keuangan pemerintah daerah. Namun berbeda dengan penelitiannya Febriansyah (2015) dan Hamara (2013) menyatakan bahwa DBH yang merupakan bagian dari dana perimbangan tidak mempunyai pengaruh apapun kepada kinerja keuangan pemerintahan daerah. Menurut penelitiannya Marizka (2014) menyatakan bahwa DBH tidak berpengaruh pada tingkatan kemandirian keuangan pemerintahan daerah.

Penelitian ini mengacukan terhadap penelitiannya sebelumnya yang dijalankannya Febriansyah (2015). Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah letak wilayah penelitian dan adanya penambahan variabel independent yaitu Dana Bagi Hasil.

Alasan penambahan variabel karena DBH merupakan dana transfer yang berasal dari potensi daerah. Berdasarkan Latar belakang diatas hasil penelitian menyimpulkan bahwa, agar penelitian ini mendapat bukti yang akurat dan empiris maka penelitian mengangkat judul: **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Banyak penelitian yang sudah dibuat mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia tetapi dalam penelitian ini diharapkan akan menjelaskan lebih rinci bagaimana kinerja pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam kasus tersebut. Pendapatan asli daerah sendiri dibagi menjadi beberapa aspek yaitu retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, pajak daerah, serta lainnya. Sedangkan untuk pendanaan perimbangan sendiri ialah dan alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Untuk itu dana perimbangan akan dijelaskan lebih rinci satu per satu sedangkan untuk pendapatan asli daerah dijadikan satu kesatuan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

- 1) Bagaimana pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah?
- 2) Bagaimana pengaruhnya DAU terhadap kinerja keuangan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah?
- 3) Bagaimana pengaruh DAK terhadap kinerja keuangan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah?
- 4) Bagaimana pengaruhnya DBH terhadap kinerja keuangan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian itu bertujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis pengaruhnya PAD kepada kinerja keuangan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Untuk menganalisis pengaruhnya DAU kepada kinerja keuangan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Untuk menganalisis pengaruhnya DAK kepada kinerja keuangan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.
- 4) Untuk menganalisis pengaruhnya DBH kepada kinerja keuangan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Mengharapkan adanya pemanfaatan yang bisa diperoleh dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Hasil dari analisis yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan bisa memberikannya pemanfaatan dibawah ini:

- 1) Kepada Akademisi, penelitian dapat memberikan panduan ataupun informasi pada peneliti lainnya dalam melaksanakan penelitian yang objeknya serupa dimasa mendatang.
- 2) Kepada peneliti, untuk menambah pengetahuan penulis sekaligus memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dalam Program Studi Akuntansi.
- 3) Kepada pemerintah, penelitian ini bisa menjadi pacuan seseorang dalam upaya peningkatan peran pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap kinerja keuangan pada Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.